

Dukungan Disulkan Hampir Rp600 Juta, Buton Selatan Bersiap Hadapi Porprov Sultra ke XV di Kendari, Andalkan Silat Untuk Raih Pretasi



Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Buton Selatan, La Salimu, S.Pd., M.M.Pd.

Laporan: Firman
BUTON SELATAN, BP -Kontingen Kabupaten Buton Selatan mulai memantapkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sulawesi Tenggara 2026 di Kota Kendari. Sebanyak 20 cabang olahraga telah terdaftar, dengan pencak silat menjadi salah satu cabang yang diandalkan untuk mendulang prestasi.

Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Buton Selatan, La Salimu, S.Pd., M.M.Pd., mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran melalui dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Nilai dukungan tersebut mencapai hampir Rp600 juta dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di tengah kebi-

Lanjut ke Hal: 7

Pemilihan Rektor UM Buton Bergulir, Berikut 11 Bakal Calon Ditetapkan dan Bersiap Jalani Penilaian Kualitatif Senat

11 Nama Ditetapkan
Panitia Penjaringan dan Penyerangan Bakal Calon Rektor UM Buton telah menetapkan 11 nama yang memenuhi hasil verifikasi dan validasi administrasi.

SK Diserahkan ke Senat
Surat keputusan penetapan diserahkan kepada Senat UM Buton di Gedung B, Ruang Rapat Fakultas Agama Islam, Selasa, 29 September 2026.

Masuk Tahap Penilaian
Senat UM Buton akan melakukan penilaian kualitatif terhadap 11 bakal calon sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Penting untuk Tata Kelola
Pemilihan rektor adalah bagian penting dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penguatan kelembagaan UM Buton.

11 BAKAL CALON REKTOR UM BUTON

- 1 Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H.
- 2 Dr. Azaluddin, S.E., M.Ak.
- 3 Dr. Suardin, S.Pd., M.Pd.
- 4 Dr. Nadir La Djamudi, S.Pd., M.Pd.
- 5 Dr. Suriadi, S.P., M.M.
- 6 Dr. Samritin, S.Pd., M.Pd.
- 7 Dr. Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P.
- 8 Dr. Ansar Suherman, M.I.Kom.
- 9 Dr. Samsul Bahari, S.E., M.Si.
- 10 Dr. Syamsul Bahri Bahar, S.T., M.T.
- 11 Dr. Rabiyyatul Jasiyah, S.E., M.Ak.

Bersama Membangun UM Buton yang Lebih Baik

Laporan: ARDI, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- " Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) memasuki tahapan baru pemilihan rektor masa jabatan 2026-2030 setelah Panitia Penjaringan dan Penyerangan Bakal Calon Rektor menetapkan 11 nama yang dinyatakan memenuhi hasil verifikasi dan validasi administrasi. SK penetapan tersebut diserahkan kepada Senat UM Buton di Gedung B, Ruang Rapat Fakultas Agama Islam, Selasa, 29 September 2026, sebagaimana dirilis dalam website resmi UM Buton

Sebelas nama itu ialah
1. Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H.
2. Dr. Azaluddin, S.E., M.Ak.
3. Dr. Suardin, S.Pd., M.Pd.
4. Dr. Nadir La Djamudi, S.Pd., M.Pd.
5. Dr. Suriadi, S.P., M.M.
6. Dr. Samritin,

Lanjut ke Hal: 7

Hari Jadi Kota Baubau ke-25 Sebagai Darah Otonom, Dinkes Perkuat Edukasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis Pada 80 Pelajar SMAN 1



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Sebanyak 80 pelajar SMAN 1 Baubau mendapat edukasi mengenai pencegahan HIV, infeksi menular seksual (IMS) atau sifilis, dan hepatitis dalam kegiatan Sosialisasi Triple Eliminasi yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes)

Lanjut ke Hal: 7

Hari Kesaktian Pancasila 2026, Pemkab Buton Selatan Serukan Nilai Kebangsaan

Laporan: FIRMAN

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara yang digelar di Lapangan SMP Negeri 1 Batauga, Kamis (1/10/2026).



Upacara diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), para asisten, staf ahli bupati, kepala bagian, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Buton Selatan. Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lanjut ke Hal: 7

Wakili Sultra, BKMT Buton Selatan Sabet Juara 1 Paduan Suara Nasional di Jakarta



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Buton Selatan meraih Juara 1 Lomba Paduan Suara pada Grand Final BKMT Festival tingkat nasional di Gedung Serbaguna (SG2) Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Prestasi tersebut menempatkan Buton Selatan di posisi teratas, mengungguli BKMT Sumatera Selatan dan BKMT Sulawesi Utara.

Keberhasilan itu diperoleh setelah tim Buton Selatan melalui tahapan kompetisi di

tingkat Sulawesi Tenggara. Pada April 2026, mereka lebih dahulu menjadi juara Lomba Paduan Suara Himne dan Mars BKMT tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil tersebut mengantarkan BKMT Buton Selatan sebagai wakil Sultra dalam kompetisi nasional.

Ketua BKMT Buton Selatan, Hj. Sitti Norma Adios, memimpin langsung rombongan dalam perjalanan ke Jakarta. Ia menyebut capaian tersebut tidak semata-mata menjadi kebanggaan organisasi, tetapi juga menunjukkan hasil kerja ber-

sama para anggota majelis taklim yang membawa identitas daerah ke tingkat nasional.

"Ini bukan sekadar piala atau kemenangan. Ini adalah bukti bahwa semangat keagamaan, persaudaraan, dan kerja keras ibu-ibu di Buton Selatan mampu bersaing dan menorehkan prestasi di tingkat nasional," kata Sitti Norma Adios.

Kemenangan itu menjadi bagian dari rangkaian Muktamar X BKMT, Grand Final BKMT Festival, dan Tasyakur Milad ke-45 BKMT yang ber-

Lanjut ke Hal: 7

MA Kabulkan Uji Pendapat DPRD Gowa, Proses Pemberhentian Bupati Berlanjut



Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan anggota DPRD Kabupaten Gowa untuk memberhentikan Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terkait usulan pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Putusan tersebut membuka tahapan lanjutan proses pemberhentian kepala daerah setelah usulan DPRD mendapat penilaian hukum dari MA.

Putusan itu tercatat dalam perkara Nomor 1P/UP/2026 yang diregistrasi pada 21 Agustus 2026 dan diputus pada 1 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, "Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum." Informasi tersebut tercantum dalam sistem informasi perkara MA.

Perkara tersebut diajukan setelah DPRD Gowa menyepakati usulan pemberhentian Sitti Husniah melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat. Sebanyak 45 anggota DPRD dari tujuh fraksi menandatangani persetujuan usulan tersebut dalam rapat paripurna pada 12 Agustus 2026.

Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Dian Purnamasari, sebelumnya meng-

tersebut merupakan sikap kelembagaan DPRD. "Secara kelembagaan kami menyetujui semuanya. Fraksi-fraksi semua menyetujui. Tujuh fraksi menyetujui secara bulat, semuanya," kata Dian.

Usulan itu merupakan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa. Dalam proses tersebut, dewan mengusut sejumlah persoalan yang kemudian menjadi dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, termasuk dugaan pelanggaran etika atau tindakan tercela, dugaan persoalan dalam pengadaan seragam sekolah, serta pencabutan bantuan beasiswa doktoral. Sejumlah laporan media juga menyebutkan nilai pengadaan seragam yang dipersoalkan mencapai Rp16 miliar.

Dari sisi hukum tata pemerintahan, putusan MA merupakan bagian penting dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, MA memang diberi kewenangan memeriksa dan memutus uji pendapat DPRD mengenai pemberhentian kepala daerah dalam kondisi tertentu. Putusan dalam perkara tersebut bersifat final.

Dengan demikian, putusan MA tidak

serta-merta berarti seluruh proses administratif pemberhentian telah selesai. Untuk bupati, setelah putusan MA, pimpinan DPRD menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan antara DPRD, MA, dan pemerintah pusat dalam proses pemberhentian kepala daerah.

Kuasa hukum DPRD Gowa, Khairil Jalil, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketentuan hukum. "Putusan ini bersifat final, sehingga DPRD akan menjalankan tahapan hukum berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan MA. Namun, ia menyatakan masih ada hal yang akan disampaikan berkaitan dengan proses keluarnya putusan tersebut. "Iya, tapi ada yang akan kami bongkar dalam proses kabulnya putusan itu," c kata Adhi.

Mekanisme semacam ini menunjukkan bahwa pemberhentian kepala daerah di Indonesia tidak semata-mata

ditentukan oleh keputusan politik DPRD. Sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, MA memiliki posisi khusus dalam menguji pendapat DPRD terkait pemberhentian kepala daerah. UU tersebut ditetapkan pada 30 September 2014 dan diundangkan pada 2 Oktober 2014.

Secara historis, mekanisme pemakzulan atau impeachment bukan hanya dikenal dalam sistem ketanegaraan Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, konsep impeachment berkembang dari praktik Parlemen Inggris sejak abad ke-14 sebagai mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik. Dalam sistem AS, DPR mengajukan dakuwaan, sedangkan Senat mengadili perkara impeachment.

Perbedaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa setiap negara membangun jalur pertanggungjawaban pejabat publik sesuai desain konstitusinya. Dalam kasus Gowa, putusan MA pada 1 Oktober 2026 menjadi titik penting karena proses pemberhentian yang sebelumnya berlangsung di DPRD kini memasuki tahapan hukum dan administratif berikutnya sesuai ketentuan pemerintahan daerah. (*)

Komisi III DPR Soroti Oknum Polri Arogan Saat Bertemu Kapolri Suyudi



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menyampaikan dukungan sekaligus masukan kepada Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam kunjungan ke kediamannya di Jakarta, Sabtu (3/10). Dalam pertemuan tersebut, persoalan sikap arogan sebagian oknum pejabat Polri menjadi salah satu keluhan yang disampaikan kepada mantan Kabareskrim tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, masukan itu disampaikan sebagai bagian dari harapan agar Suyudi dapat melakukan pembenahan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Komisi III yang hadir juga memberikan dukungan kepada Suyudi untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

"Sebagian juga menyampaikan keluhan adanya oknum pejabat Polri yang arogan dan meminta hal tersebut diperbaiki," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (3/10).

Selain membahas pembenahan institusi, pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Suyudi memperkenalkan anggota keluarganya kepada para anggota Komisi III DPR yang datang. Kunjungan semacam itu disebut Habiburokhman sebagai tradisi yang dilakukan Komisi III setiap terjadi pergantian Kapolri.

"Ya benar tadi Komisi III berkunjung ke kediaman Kapolri. Ini tradisi yang terus kami lakukan setiap pergantian Kapolri," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Suyudi juga kembali menyampaikan komitmen

menyampaikan konsep "Polisi Sahabat Masyarakat". Gagasan itu menempatkan kedekatan antara kepolisian dan warga sebagai salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

"Dalam kesempatan itu Pak Kapolri memperkenalkan keluarganya. Selain itu Pak Kapolri mempertegas komitmen untuk memak-simalkan konsep Polisi Sahabat Masyarakat," kata Habiburokhman.

Pertemuan itu terjadi hanya dua hari setelah Suyudi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (1/10). Sebelumnya, Prabowo mengajukan Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri melalui Surat Presiden bertanggal Rabu (30/9) untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Komisi III DPR kemudian menyetujui Suyudi untuk memimpin Polri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo setelah proses fit and proper test pada Kamis pagi. Pada hari yang sama, Listyo Sigit dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Pergantian pucuk pimpinan Polri memiliki konsekuensi penting karena Kapolri bertanggung jawab memimpin institusi yang memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan polisi dengan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mem-

bangun legitimasi penegakan hukum.

Secara historis, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami perubahan mendasar setelah reformasi 1998. Pemisahan Polri dari ABRI melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan kemudian pengaturan kelembagaannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi bagian dari proses menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Gagasan mendekatkan polisi dengan masyarakat juga bukan hanya berkembang di Indonesia. Secara internasional, konsep community policing berkembang di berbagai negara sejak akhir abad ke-20 sebagai pendekatan yang menekankan kemitraan polisi dan warga, pencegahan kejahatan, serta penyelesaian persoalan keamanan berbasis komunitas. Karena itu, komitmen Suyudi terhadap konsep "Polisi Sahabat Masyarakat" berada dalam arus lebih luas reformasi kepolisian yang menempatkan kepercayaan publik sebagai modal penting penegakan hukum.

Kunjungan anggota Komisi III ke kediaman Suyudi tersebut kemudian dibagikan Habiburokhman melalui akun media sosial Instagram miliknya. Pertemuan itu sekaligus menjadi komunikasi awal antara parlemen dan Kapolri baru mengenai agenda pembenahan Polri, termasuk harapan agar perilaku oknum yang dinilai arogan dapat ditangani dan hubungan kepolisian dengan masyarakat semakin baik. (*)

Sultra Targetkan Bedah 200 Rumah, Gubernur Sumbang Rp250 Juta



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Sebanyak 200 rumah masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara ditargetkan mendapat bantuan melalui Program Gotong Royong Bedah Rumah yang diluncurkan di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Rabu (30/9/2026). Program lintas lembaga tersebut menggabungkan bantuan pemerintah, zakat, dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta dukungan masyarakat untuk memperluas akses hunian layak.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan kebutuhan tempat tinggal merupakan salah satu dasar yang harus dipenuhi sebelum masyarakat didorong meningkatkan taraf hidup melalui pekerjaan dan sumber penghasilan. Karena itu, ia mendorong agar berbagai program bedah rumah yang telah berjalan tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, melainkan disatukan melalui kolaborasi.

“Dengan adanya gotong royong seperti ini, maka kita memulai kesejahteraan masyarakat itu dari rumah,” kata Andi saat menghadiri peluncuran program yang digelar BAZNAS Sultra bersama Kejaksaan Tinggi Sultra tersebut.

Dukungan gubernur diwujudkan melalui sumbangan pribadi Rp250 juta. Ajakan tersebut kemudian mendapat respons

dari sejumlah pihak yang hadir sehingga terkumpul tambahan donasi secara spontan sekitar Rp400 juta. Andi menegaskan bantuan tersebut ditujukan sepenuhnya untuk memastikan pembangunan rumah penerima manfaat terlaksana.

Program itu dilaksanakan serentak secara daring di 17 kabupaten/kota se-Sultra dengan melibatkan BAZNAS Sultra, Tunas Muda Adhyaksa, Real Estate Indonesia (REI) Sultra, Satker Penyedia Perumahan Wilayah III Sulawesi, serta sejumlah pihak lainnya. Ketua BAZNAS Sultra Punardin, S.Ag., mengatakan sasaran program adalah masyarakat berpenghasilan rendah pada desil 1 sampai 4.

Setiap rumah memperoleh dukungan senilai Rp50 juta. Bantuan tersebut terdiri atas Rp20 juta melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN dan Rp30 juta dari dana CSR yang dikelola BAZNAS. Data penerima diarahkan melalui integrasi dengan instansi perumahan agar pembangunan rumah yang dibantu dapat tercatat dalam program perumahan nasional.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Dr. Sugeng Riyanta mengatakan kolaborasi tersebut dimaksudkan untuk menghidupkan kembali gotong royong sebagai kekuatan bersama. Menurut dia, program bedah rumah sebelumnya telah dilakukan pemerintah dan sejumlah lembaga, tetapi cenderung berjalan secara parsial sehingga perlu disin-

ergikan agar cakupannya lebih luas dan pelaksanaannya lebih terarah.

“Melalui kolaborasi, program tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih masif dan terarah,” ujar Sugeng. Kejaksaan melalui fungsi perdata dan tata usaha negara (Datun) juga mendampingi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan pembangunan rumah.

Kolaborasi tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik. Masyarakat berpenghasilan rendah juga diarahkan mendapat dukungan kepemilikan dokumen pertanahan melalui program sertifikasi tanah yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional. Pada peluncuran program, bantuan BSPS, bantuan bedah rumah, sertifikat tanah, serta 150 paket sembako diserahkan secara simbolis kepada masyarakat.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengawasan dan Pengendalian sekaligus Pembina Wilayah Provinsi Sultra, Hj. Neyla Saida Anwar, MH., M.Hum., mengatakan program tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat di-dayagunakan untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mendorong peningkatan dukungan melalui zakat, infak, dan sedekah serta meminta penerima manfaat menjaga rumah yang telah dibangun.

Secara nasional, pengelolaan zakat memperoleh landasan kelembagaan yang lebih kuat setelah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan pada 25 November 2011. Regulasi itu menempatkan zakat antara lain sebagai instrumen untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan.

Dalam konteks global, persoalan hunian layak telah menjadi agenda pembangunan internasional sejak Konferensi Habitat I di Vancouver pada 1976. Agenda tersebut berkembang melalui Habitat II di Istanbul pada 1996 dan kemudian masuk dalam SDG 11 yang menargetkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pada 2026, UN-Habitat masih menempatkan krisis perumahan sebagai salah satu hambatan utama pencapaian SDG 11; laporan terbarunya menyebut lebih dari 3 miliar orang belum memiliki hunian yang memadai.

Di Sultra, peluncuran program ditandai dengan peninjauan rumah penerima manfaat di Kelurahan Mokoau oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur, Kajati Sultra, dan jajaran terkait. Mereka sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah. Salah satu penerima manfaat, Abdul Rahman, warga penyandang disabilitas, menyampaikan terima kasih dan berharap pembangunan rumahnya segera selesai sehingga keluarganya dapat menempati hunian yang lebih layak. (*)

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Gubernur Sultra Tekankan Persatuan



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 di halaman Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Kamis (1/10/2026). Peringatan tersebut menjadi momentum untuk kembali menegaskan Pancasila sebagai landasan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Tema tersebut menjadi latar pelaksanaan upacara yang diikuti Wakil Gubernur Sultra, Forkopimda, staf ahli gubernur, para asisten Setda, kepala perangkat daerah, pejabat eselon III dan IV, pejabat fungsional, serta seluruh ASN lingkup Pemerintahan Provinsi Sultra.

Dalam prosesi tersebut, Andi Sumangerukka membacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Ikrar itu kembali menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam membangun kebersamaan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta menjaga keutuhan NKRI.

Ikrar juga mengingatkan bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi berbagai rongrongan terhadap NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman tersebut, sebagaimana disebutkan dalam

ikrar, dapat berkembang ketika bangsa Indonesia lengah dan kurang waspada terhadap upaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian substansi ikrar yang dibacakan dalam upacara tersebut.

Rangkaian kegiatan diawali laporan kesiapan upacara, kemudian dilanjutkan dengan menghenykan cipta yang dipimpin Gubernur Sultra selaku pembina upacara. Setelah itu, peserta mengikuti pembacaan Teks Pancasila dan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum memasuki prosesi pembacaan ikrar.

Secara historis, penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila memiliki pijakan hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 yang ditetapkan pada 27 September 1967. Keppres tersebut secara resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Momentum tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang pembentukan dasar negara. BPIP mencatat Pancasila pertama kali diperkenalkan Sukarno dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Gagasan itu kemudian mengalami proses perumusan melalui Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 hingga disepakati sebagai

rumusan final dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Proses tersebut berlangsung ketika dunia masih berada dalam pusaran Perang Dunia II dan Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Di tengah perubahan geopolitik global itu, para pendiri bangsa memanfaatkan ruang politik yang tersedia untuk membicarakan dasar negara dan masa depan Indonesia. BPIP dan ANRI menempatkan rangkaian sidang BPUPK dan PPKI tersebut sebagai sumber penting untuk memahami proses historis lahirnya Pancasila.

Karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Sultra bukan hanya berlangsung sebagai seremoni pemerintahan. Kehadiran jajaran Forkopimda dan aparatur pemerintah dalam upacara tersebut sekaligus memperlihatkan penegasan kembali nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pesan yang terkandung dalam ikrar.

Melalui peringatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra kembali menempatkan Pancasila sebagai pijakan dalam menjaga kebersamaan di tengah keragaman masyarakat. Tekad mempertahankan dan mengamalkan nilai Pancasila ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan kehidupan berbangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. (*)

Bupati Buteng Azhari Satukan Pemkab dan Desa Tangani RTLH serta Kawasan Kumuh



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh dengan membenahi basis data permukiman serta memperkuat kepastian hukum atas tanah warga. Bupati Buton Tengah Dr. Azhari menilai akurasi data dan legalitas lahan menjadi fondasi agar program pembangunan tidak salah sasaran.

Penegasan itu disampaikan Azhari saat membuka Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data RTLH, Pensertifikasian Tanah, dan Penanganan Kawasan Kumuh di Aula Pancasila, Lantai V Gedung Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (29/9/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, kecamatan,

kelurahan, dan desa untuk menyelaraskan data serta strategi penanganan permukiman.

Azhari meminta Pj. Sekretaris Daerah Buton Tengah Armin dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengawal proses validasi data secara ketat. "Data harus presisi agar intervensi pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penataan ruang, benar-benar tepat sasaran," kata Azhari dalam rakor tersebut.

Persoalan pertanahan juga menjadi bagian penting pembahasan. Azhari meminta kepala desa menyelesaikan persoalan tapal batas di wilayah masing-masing melalui musyawarah dan pendekatan yang kondusif. Penyelesaian batas wilayah dinilai diperlukan agar proses pensertifikasian aset masyarakat tidak

tersendat.

Secara historis, penanganan hunian tidak layak dan kawasan kumuh di Indonesia berkembang seiring kebijakan nasional mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu landasan penting dalam menegaskan tanggung jawab pemerintah menyediakan hunian layak serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Secara global, agenda hunian layak juga mendapat perhatian melalui Sustainable Development Goal 11 yang menargetkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos.,

Pj. Sekda Armin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta seluruh camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Buton Tengah. Keterlibatan hingga pemerintahan desa diharapkan membuat pemutakhiran data berlangsung lebih dekat dengan kondisi faktual masyarakat.

"Penyelesaian persoalan tapal batas harus dilakukan dengan baik dan melalui musyawarah sehingga tidak menghambat proses sertifikasi tanah masyarakat," ujar Azhari. Pemerintah daerah berharap sinergi tersebut mempercepat penanganan RTLH, pengurangan kawasan kumuh, sekaligus memberikan kepastian hukum atas tanah warga di Buton Tengah.(*)

Mediasi Konflik Takimpo-Kombeli, Buton Siapkan Pos Pam Bersama di Perbatasan



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton bersama Kepolisian Resor Buton menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah konflik antara pemuda Takimpo dan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, kembali pecah. Salah satu langkah yang disepakati ialah pembentukan Pos Pam Bersama atau Satkamling di kawasan perbatasan kedua wilayah dengan melibatkan TNI, Polri, masyarakat, dan unsur Satpol PP.

Kesepakatan itu lahir dalam mediasi yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Buton, Pasarwajo, Senin malam, 21 September 2026. Pertemuan tersebut digelar setelah gangguan kamtibmas sehari sebelumnya menyebabkan aksi pelemparan dan pengrusakan sejumlah rumah warga di wilayah perbatasan, termasuk Kantor Lurah. Mediasi dihadiri Sekda Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.IK., M.M.Tr., jajaran PJU Polres Buton, TNI, kepala OPD terkait, Lurah Kombeli, Seklur Takimpo, serta perwakilan tokoh masyarakat kedua wilayah.

Kapolres Buton mengatakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan menjadi pilihan dalam meredakan konflik tersebut. Kepolisian juga membuka ruang bagi mekanisme hukum adat dan kearifan lokal untuk mendukung penyelesaian perselisihan. "Sesuai arahan pimpinan kami Bapak Kapolri, yang kita utamakan adalah penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Penerapan hu-

kum adat juga sangat kami dukung karena pendekatan kearifan lokal justru menurut kami dapat menjadi solusi yang tepat," kata Ali Rais Ndraha.

Sekda Buton La Ode Syamsudin meminta masyarakat dari kedua wilayah menahan diri dan mencegah generasi muda terlibat dalam aksi lanjutan. Ia mengingatkan hubungan Takimpo dan Kombeli memiliki akar sejarah yang panjang. Kedua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu desa sebelum dimekarkan menjadi Desa Lapanda atau Kombeli. Bahkan, pernah dibentuk sekolah rakyat bernama LATAKO yang merupakan singkatan dari Lapanda, Takimpo, dan Kombeli. "Kita semua bersaudara," ujar Syamsudin, seraya meminta sejarah tersebut kembali diperkenalkan kepada anak-anak muda.

Selain pos pengamanan bersama, pemerintah mengusulkan perbaikan penerangan dalam radius sekitar 100 meter di kawasan yang rawan konflik serta pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada titik-titik tertentu. Kedua wilayah juga didorong saling mengundang dalam pelaksanaan pesta adat. Tokoh adat dari Takimpo dan Kombeli akan didorong segera melaksanakan ritual adat "Piago" sebagai bagian dari ikhtiar memulihkan hubungan sosial dan mendoakan kedamaian.

Upaya tersebut akan dilanjutkan melalui sekolah-sekolah. Pemkab Buton, Polres Buton, TNI, dan tokoh masyarakat akan menyampaikan edukasi serta pesan-pesan kamtibmas dalam kegiatan apel

pagi. "Kita akan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi atau sosialisasi bersama pada saat apel pagi dengan pihak Polres, TNI, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencegah konflik ke depannya," kata Syamsudin.

Pola penyelesaian melalui dialog, pelibatan tokoh masyarakat, serta penggunaan kearifan lokal sejalan dengan prinsip pencegahan konflik berbasis masyarakat yang berkembang di berbagai daerah. Dalam sejarah Indonesia, mekanisme musyawarah dan penyelesaian perselisihan melalui tokoh adat maupun tokoh masyarakat telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sebelum sistem hukum negara berkembang seperti sekarang. Di tingkat internasional, pendekatan serupa juga dikenal dalam berbagai proses rekonsiliasi komunitas yang menempatkan dialog dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian penting setelah konflik.

Hasil mediasi menetapkan empat langkah, yaitu meminta masing-masing pihak menjadi duta damai, mendorong tokoh adat melaksanakan ritual "Piago", membentuk Pos Pam Bersama atau Satkamling di kawasan perbatasan, serta memperkuat edukasi kamtibmas melalui sekolah. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menghentikan eskalasi konflik, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan agar perselisihan antarkelompok di Takimpo dan Kombeli tidak kembali berkembang menjadi gangguan keamanan.(*)

Bupati Azhari Salurkan Rp65 Juta untuk Kegiatan Keagamaan di Lakorua

Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Penguatan kegiatan keagamaan di tingkat masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, mendorong Majelis Ta'lim Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, tidak hanya mempertahankan kegiatan rutin keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak masyarakat dalam memakmurkan masjid.

Dorongan itu disampaikan Azhari ketika menghadiri yasinan rutin malam Jumat di Kelurahan Lakorua, Kamis (24/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan Rp50 juta untuk pembangunan Masjid Al-Karim Lasipopa serta Rp15 juta untuk pengadaan pakaian Majelis Ta'lim.

Azhari menilai konsistensi masyarakat Lakorua menggelar yasinan, doa bersama, dan pengajian merupakan modal sosial yang perlu dipelihara.



Ia berharap aktivitas tersebut berkembang menjadi gerakan keagamaan yang dapat ditiru Majelis Ta'lim di wilayah lain di Buton Tengah. "Saya ingin majelis ta'lim yang ada di Kelurahan Lakorua ini nantinya bisa menjadi contoh bagi majelis-majelis ta'lim lainnya yang ada di Buton Tengah," kata Azhari.

Untuk mempermudah koordinasi, Azhari meminta Camat Mawasangka Tengah mendorong pembentukan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) hingga tingkat kecamatan serta desa dan kelurahan. Menurut dia, keberadaan wadah koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat

dapat berlangsung lebih terarah dan berkesinambungan.

Selain persoalan keagamaan, pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga menyampaikan kebutuhan infrastruktur. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan akses menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang memerlukan pembangunan jalan sepanjang sekitar 200 meter.

Pemerintah daerah menyatakan akan mengupayakan pembangunan jalan tersebut dengan terlebih dahulu memastikan status dan legalitas lahan. Azhari juga menyatakan akan membantu penyelesaian persoalan sertifikat tanah lokasi pemaka-

man sehingga lahan TPU memiliki kepastian hukum dan dapat digunakan masyarakat tanpa persoalan di kemudian hari.

Kegiatan itu dihadiri Pj. Sekda Buton Tengah Armin, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Camat Mawasangka Tengah, Lurah Lakorua, Kepala Desa Lantongau, Kepala Desa Langkomu, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga sekitar. Penyaluran bantuan dan respons terhadap aspirasi warga menunjukkan pendekatan pemerintah daerah yang menggabungkan penguatan kehidupan sosial-keagamaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Secara historis, pen-

gajian, yasinan, dan majelis taklim telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Peran majelis taklim bahkan memiliki akar panjang dalam tradisi pendidikan Islam nonformal di Nusantara, jauh sebelum Indonesia merdeka pada 1945. Dalam perkembangan modern, wadah tersebut tidak hanya berfungsi

si sebagai ruang pembelajaran keagamaan, tetapi juga menjadi sarana membangun solidaritas sosial di tingkat komunitas. Karena itu, penguatan kelembagaan Majelis Ta'lim di Lakorua dapat ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni mempertahankan fungsi ruang keagamaan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.(*)

30 Kursi DPRD Kota Baubau: Wacana, Kebutuhan, dan Agenda Besar Menata Potensi Pertumbuhan Kota (Opini Bagian 1)

WACANA peningkatan jumlah kursi DPRD Kota Baubau dari 25 menjadi 30 kursi tidak semestinya hanya dibaca sebagai dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Lebih jauh dari itu, wacana tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda jangka panjang penataan demografi, pembangunan wilayah, penguatan ekonomi, administrasi kependudukan, dan representasi politik masyarakat Kota Baubau. Secara ketentuan, daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 sampai dengan 200.000 jiwa memperoleh alokasi 25 kursi DPRD, sedangkan daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 sampai dengan 300.000 jiwa memperoleh 30 kursi. Dengan data penduduk Kota Baubau yang masih berada pada kisaran 165 ribu jiwa, maka secara demografis Baubau belum berada pada ambang 30 kursi.

Namun, justru karena belum berada pada ambang tersebut, perencanaan tidak boleh menunggu sampai dinamika politik Pemilu 2029 berlangsung. Ketua Bawaslu Baubau Sarmin mengatakan, Apabila peningkatan jumlah kursi kelak menjadi kebutuhan, maka pemetaan potensi pertumbuhan penduduk dan seluruh infrastruktur pendukungnya harus dilakukan jauh sebelumnya. Dengan kata lain, 2029 bukan titik awal untuk bekerja, tetapi harus menjadi salah satu horizon waktu dari pekerjaan yang dimulai sejak sekarang.

Dari Wacana Politik Menjadi Agenda

Perencanaan Kota

Ada perbedaan mendasar antara memperjuangkan tambahan kursi dan menyiapkan kondisi objektif yang memungkinkan tambahan kursi tersebut terjadi.

Jika pendekatannya hanya politik elektoral, maka pembicaraan tentang 30 kursi berpotensi muncul ketika tahapan Pemilu 2029 sudah dekat. Akibatnya, ruang untuk melakukan konsolidasi data, memperbaiki administrasi kependudukan, memetakan mobilitas penduduk, membangun infrastruktur pelayanan, dan menyusun kajian akademik menjadi sangat terbatas.

Sebaliknya, jika pendekatannya adalah perencanaan pembangunan, maka Kota Baubau dapat mulai mengidentifikasi sejak dini seluruh potensi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota.

Pertanyaannya bukan semata-mata:

“Bagaimana Baubau mendapatkan tambahan lima kursi?”

Tetapi: “Bagaimana Baubau menata seluruh potensi pertumbuhan penduduknya sehingga apabila secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum telah memenuhi persyaratan, kebutuhan representasi 30 kursi dapat dipersiapkan secara tertib, terukur dan legitimate?” ungkapnya.

Perubahan cara pandang ini sangat penting. Sebab jumlah kursi DPRD merupakan konsekuensi dari perkembangan penduduk dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan sekadar hasil dari kehendak politik.

Potensi Penduduk Baubau Perlu Dipe-



Penulis Adalah Ketua Bawaslu Baubau Sarmin

takan Sejak Dini

Salah satu pekerjaan strategis yang dapat dilakukan adalah memetakan populasi potensial yang secara faktual beraktivitas, bekerja, belajar dan menetap di Kota Baubau, kemudian memastikan status administrasinya sesuai dengan ketentuan.

Baubau merupakan kota pendidikan, perdagangan, jasa dan pusat aktivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Buton. Karena itu, terdapat mobilitas penduduk yang perlu dibaca secara lebih komprehensif.

Potensi tersebut antara lain dapat dipe-

- takan dari:
1. Mahasiswa perguruan tinggi di Kota Baubau;
 2. Karyawan perusahaan swasta;
 3. Pegawai BUMN/ BUMD;
 4. ASN dan keluarga yang menetap di Baubau;
 5. Pelaku UMKM dan pekerja sektor informal;
 6. Tenaga kesehatan, pendidik dan tenaga profesional;
 7. Masyarakat pendatang yang telah menetap dalam jangka panjang;
 8. Pekerja sektor perdagangan, jasa dan

transportasi;

9. Komunitas masyarakat yang melakukan mobilitas antar-daerah tetapi memiliki aktivitas utama di Baubau;

10. Pertumbuhan kawasan permukiman baru dan pusat-pusat ekonomi baru.

Tetapi pemetaan ini tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk “mengumpulkan suara” atau memindahkan penduduk demi memperoleh tambahan kursi. Pendekatannya harus administratif, demografis dan pembangunan.

Yang perlu diketahui adalah: berapa jumlah penduduk yang benar-benar tinggal di Baubau, bagaimana pola mobilitasnya, bagaimana status administrasinya kependudukannya, di mana konsentrasi pertumbuhan penduduk terjadi, dan bagaimana kecenderungan pertumbuhannya dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Perguruan Tinggi sebagai Salah Satu Titik Pemetaan

Perguruan tinggi merupakan salah satu ekosistem penting yang perlu masuk dalam kajian demografi Kota Baubau.

Keberadaan mahasiswa dari berbagai

wilayah menunjukkan bahwa Baubau mempunyai daya tarik sebagai kota pendidikan. Namun, mahasiswa tidak otomatis dapat dihitung sebagai penduduk Kota Baubau untuk kepentingan penentuan jumlah kursi DPRD. Karena itu, yang diperlukan bukan sekadar menghitung jumlah mahasiswa, tetapi melakukan kajian mobilitas dan status kependudukan secara legal dan statistik.

Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dapat membangun kerja sama pertukaran data agregat dan kajian kependudukan dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Dari sana dapat diketahui pola yang lebih luas: berapa mahasiswa yang berasal dari luar daerah, berapa yang menetap setelah menyelesaikan pendidikan, bagaimana kecenderungan mereka masuk ke pasar kerja lokal, dan seberapa besar perguruan tinggi berkontribusi terhadap pertumbuhan kota.

Hal yang sama dapat diterapkan terhadap sektor swasta, BUMN/ BUMD, ASN, tenaga profesional, dan kelompok pekerja lainnya.

Konsolidasi Data Harus Menjadi Infrastruktur Utama

Jika Baubau ingin membangun perencanaan menuju kota dengan populasi yang lebih besar, maka data kependudukan harus menjadi infrastruktur pembangunan yang sama pentingnya dengan jalan, pelabuhan, air bersih, listrik dan fasilitas publik lainnya.

Tanpa data yang kuat, pemerintah akan kesulitan menjawab pertanyaan sederhana: Berapa sebenarnya penduduk Baubau? Di mana pertumbuhan penduduk paling cepat? Kecamatan mana yang mengalami peningkatan signifikan? Berapa penduduk yang datang dan menetap?

Berapa yang keluar? Berapa penduduk usia produktif? Berapa mahasiswa yang kemudian menjadi tenaga kerja? Bagaimana perkembangan kawasan permukiman? Bagaimana kebutuhan sekolah, rumah sakit, transportasi dan lapangan kerja? Dan, pada akhirnya, bagaimana perkembangan penduduk tersebut memengaruhi kebutuhan representasi politik?

Karena itu diperlukan konsolidasi data lintas sektor, bukan sekadar data dari satu instansi.

BPS memiliki fungsi statistik. Dukcapil memiliki administrasi kependudukan. Pemerintah daerah memiliki data pembangunan. Perguruan tinggi memiliki data akademik. Dunia usaha memiliki data tenaga kerja. BUMN/ BUMD memiliki data pegawai. Kecamatan dan kelurahan memili-

ki pengetahuan faktual mengenai perkembangan masyarakat di wilayahnya.

Seluruhnya dapat menjadi bahan bagi proyeksi demografi Kota Baubau tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan data pribadi.

Kerja Ekstra dan Kebijakan Besar

Mewujudkan agenda tersebut tentu bukan pekerjaan sederhana.

Dibutuhkan kerja ekstra, kebijakan yang terintegrasi, anggaran, koordinasi lintas lembaga, serta keberanian pemerintah daerah untuk menjadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pemerintah Kota Baubau dapat memulai dengan membentuk semacam forum atau tim kajian pertumbuhan penduduk dan representasi daerah yang melibatkan unsur pemerintah, BPS, Dukcapil, DPRD, KPU, Bawaslu, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait.

Forum tersebut tidak bertugas menentukan atau menjanjikan 30 kursi. Tugasnya adalah membaca kecenderungan pertumbuhan Kota Baubau secara objektif.

Kajian dapat menghasilkan:

baseline penduduk â†’ proyeksi penduduk â†’ peta pertumbuhan wilayah â†’ pemetaan mobilitas â†’ kebutuhan infrastruktur â†’ proyeksi ekonomi â†’ proyeksi penduduk usia produktif â†’ kebutuhan pelayanan publik â†’ kajian representasi politik.

Dengan model tersebut, pembicaraan mengenai 30 kursi ti-

Bersambung Edisi Selasa 6 Oktober 2026

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Lima Residivis Sindikat Ganjal ATM Dibekuk, Korban Tersebar 3 Provinsi



Laporan: Amran

SURABAYA, BP- Jaringan pencuri lintas provinsi yang mengincar pengguna mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Lima residivis ditangkap setelah diduga menjalankan modus ganjal kartu ATM di lebih dari 50 lokasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pengungkapan sindikat tersebut bermula dari laporan kasus pengganjalan ATM di Singosari, Malang, pada 16 September 2026. Polisi kemudian memburu anggota kelompok yang diketahui berpindah-pindah wilayah dan akhirnya menangkap mereka secara terpisah di Tangerang, Cikampek, Nagreg, Garut, hingga Ciamis.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan jaringan itu menyasar mesin ATM yang berada di minimarket dan rest area jalan tol. Jalur yang menjadi sasaran membenatang dari Banyuwangi hingga Merak, dengan lokasi terbanyak berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Jadi, modus dari tersangka ini di semua TKP yang paling banyak di rest area, tol mulai dari Banyuwangi sampai ke Merak sana. Dan yang paling banyak di Jatim dan di Jateng,” kata Jumhur di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (1/10).

Kanit III Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim AKPM Fauzi mengungkapkan, para pelaku menggunakan tusuk gigi untuk mengganjal lubang kartu pada mesin ATM. Ketika kartu korban tersangkut, seorang pelaku berpura-pura memberikan pertolongan, sedangkan anggota lainnya berdiri di belakang korban untuk mengamati PIN.

Kartu korban kemudian ditukar dengan kartu milik pelaku yang jenisnya sama. Korban yang tidak menyadari pertukaran tersebut diminta kembali memasukkan PIN. Setelah PIN diketahui, pelaku meninggalkan lokasi dan menggunakan kartu korban untuk mengurus rekening.

“Begitu ATM diserahkan ke tersangka, itu langsung dioper dengan ATM milik pelaku dengan jenis yang sama, kemudian diser-

ahkan ke korban untuk mengulangi nomor PIN-nya,” ujar Fauzi.

Kelima tersangka memiliki pembagian tugas yang berbeda. DD (42), warga Cilegon, menjadi eksekutor; MW (45), warga Lampung, bertugas mengalihkan perhatian; AS (42), warga Bandung, mengintip PIN korban; sementara ADS (35), warga Sumedang, dan YA alias AN (45), warga Lampung, berperan sebagai sopir.

Nilai kerugian korban mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Di salah satu lokasi di Probolinggo, misalnya, sindikat tersebut disebut berhasil menguras sekitar Rp100 juta. Uang di bawah Rp10 juta biasanya ditarik tunai, sedangkan saldo di atas Rp20 juta ditransfer ke sejumlah rekening penampung, termasuk rekening istri siri salah satu tersangka.

Jumhur mengatakan, para pelaku saling mengenal ketika menjalani hukuman di lembaga pasyarakatan karena kasus serupa. Setelah berakasi, mereka menghindari penginapan untuk mengurangi risiko terdeteksi polisi dan memilih kembali ke daerah masing-masing se-

belum berkumpul lagi di lokasi yang telah disepakati.

“Mereka kenal waktu di lapas. Jadi mereka, yang punya ide itu yang ada di Tasik ya, itu yang paling senior,” kata Jumhur.

Fenomena pencurian melalui rekayasa pada mesin ATM bukan persoalan baru dalam perkembangan kejahatan perbankan. Seiring meluasnya penggunaan ATM sejak dekade 1960-an dan 1970-an, berbagai negara kemudian menghadapi modus seperti card trapping, pencurian kartu, pengintaian PIN, hingga skimming. Di Indonesia, penggunaan ATM berkembang pesat sejak jaringan ATM mulai diperkenalkan perbankan pada akhir 1980-an dan kemudian menjadi bagian penting transaksi masyarakat.

Atas perkara tersebut, kelima tersangka ditahan dan dijerat Pasal 476 atau Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. (*)

Digerebek Saat Gunakan Narkoba, Tiga Legislator Gerindra Direhabilitasi



Tiga anggota DPRD Gerindra di Jatim ditangkap usai pesta narkoba

Laporan: Hadi

SURABAYA, BP- Tiga anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Situbondo, Banyuwangi, dan Kabupaten Malang menjalani rehabilitasi rawat jalan setelah diamankan polisi ketika menggunakan narkoba dalam sebuah kamar hotel di kawasan Ketintang, Surabaya. Mereka tidak ditahan karena perkara tersebut diproses melalui mekanisme restorative justice setelah jumlah barang bukti dinilai berada di bawah ambang batas yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Ketiga legislator itu ialah ARR dari DPRD Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, dan UAM dari DPRD Kabupaten Malang. Mereka bersama lima orang lainnya, yakni F, K, N, Ro, dan R, diamankan Satresnarkoba Polrestaes Surabaya setelah polisi memperoleh informasi masyarakat mengenai pesta narkoba yang berlangsung di hotel tersebut.

Kasi Humas Polrestaes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, delapan orang ditemukan polisi dalam kondisi menggunakan narkoba. Dari lokasi, petugas menyita satu plastik sabu bekas pakai, dua butir pil ekstasi warna kuning, alat isap, korek, serta satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyimpan sabu.

“Dalam kondisi menggunakan narkoba,” kata Hadi, Rabu (30/9).

Hasil pemeriksaan urine menunjukkan tujuh orang positif menggunakan ekstasi, sedangkan N diketahui mengonsumsi sabu sekaligus ekstasi. N kemudian mengaku memperoleh narkoba dan ekstasi tersebut dari seseorang berinisial C di Surabaya. Polisi menetapkan C dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

P e n a n g a n a n perkara tersebut berlanjut melalui asesmen terpadu. Polrestabes Surabaya mengajukan permohonan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu di BNN Provinsi Jawa Timur, sedangkan pelaksanaannya dilakukan di BNN Kota Surabaya. Hasil asesmen menjadi dasar pemberian rehabilitasi rawat jalan terhadap empat orang yang kemudian dilimpahkan ke BNN Kabupaten Banyuwangi.

Kepala BNN Kabupaten Banyuwangi Kombes Rachmat Kurniawan membenarkan pelimpahan tersebut. Empat orang, yakni tiga legislator Gerindra dan pengusaha berinisial N, tiba di kantor BNN Kabupaten Banyuwangi pada Rabu (30/9) sekitar pukul 20.00 WIB. “Kami menerima pelimpahan ada empat orang semuanya, dan sudah sampai di kantor kami pada Rabu

malam sekitar pukul 20.00 WIB,” ujar Rachmat, Kamis (1/10).

Penggunaan mekanisme rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika sejalan dengan pendekatan hukum yang membedakan pengguna atau korban penyalahgunaan dari jaringan peredaran gelap. Di Indonesia, kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika telah berkembang sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara secara global pendekatan kesehatan terhadap penggunaan narkotika juga semakin mendapat perhatian. Namun, penerapannya tetap bergantung pada hasil asesmen, barang bukti, serta proses hukum masing-masing perkara.

Kasus tersebut turut mendapat respons dari DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah menyatakan partainya menunggu hasil proses hukum sebelum menjatuhkan sanksi. “Apabila terbukti tentu akan dipecat dan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) apabila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota dewan. Namun, kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Kharisma. (*)

Pemilihan Rektor UM Buton Bergulir, Berikut 11 Bakal Calon Ditetapkan dan Bersiap Jalani Penilaian Kualitatif Senat

S.Pd., M.Pd.
7. Dr. Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P.
8. Dr. Ansar Suherman, M.I.Kom.
9. Dr. Samsul Bahari, S.E., M.Si.
10. Dr. Syamsul Bahri Bahar, S.T., M.T.;
11. Dr. Rabiyyatul Jasyiah, S.E., M.Ak.
Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Panitia Penjarangan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor UM Buton Nomor 10/KEP/II.3.AU/UMB-PAN/B/2026 tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Masa Jabatan 2026-2030. Keputusan tersebut menjadi dasar administratif bagi berlanjutan proses pemilihan ke tahapan kelembagaan berikutnya.
Setelah menerima SK, Senat UM Buton akan melakukan pe-

nilaian kualitatif terhadap para bakal calon sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses tidak berhenti pada verifikasi persyaratan administratif, tetapi berlanjut pada tahapan penilaian di tingkat senat universitas.
Secara kelembagaan, pemilihan rektor merupakan bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi karena pimpinan universitas memiliki peran dalam mengarahkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan. UM Buton sendiri menempatkan tata kelola perguruan tinggi sebagai bagian dari pengembangan institusi yang berlandaskan prinsip good university gover-

nance.
UM Buton bermula dari prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Buton pada 1999. Pada 3 Desember 1999, Universitas Islam Buton disepakati berubah menjadi amal usaha Muhammadiyah dengan nama Universitas Muhammadiyah Buton. Pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81/D/O/2001 pada 10 Juli 2001 mengenai izin penyelenggaraan program studi dan pendirian UM Buton.
Dalam perkembangannya, UM Buton memperluas bidang akademik melalui pembukaan berbagai program studi dan fakultas. Dokumen se-

jarah universitas mencatat sejumlah periode kepemimpinan rektor sebelumnya, mulai dari Drs. H. Andi Muh. Syahir Baso, S.H., M.H. (2000-2008), Dr. H. Syarifuddin Bone, Drs., S.H., M.Si., M.H. (2008-2014), Dr. Suriadi, S.P., M.M. (2014-2018), hingga Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M. (2018-2022).
Dengan penetapan 11 bakal calon tersebut, pemilihan Rektor UM Buton masa jabatan 2026-2030 kini memasuki tahapan penilaian kualitatif oleh Senat. Seluruh proses selanjutnya akan berjalan berdasarkan mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan universitas. (*)

Hari Kesaktian Pancasila 2026, Pemkab Buton Selatan Serukan Nilai Kebangsaan

Buton Selatan, Insanu, SKM., M.Si., memimpin upacara dengan mewakili Bupati Buton Selatan.
Pembacaan ikrar menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian upacara tersebut. Di hadapan peserta, Insanu menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar yang menyatukan kehidupan kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat.
“Pancasila adalah jiwa bangsa, fondasi persatuan, dan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara,” kata Insanu saat membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila.
Peringatan pada 1 Oktober memiliki konteks sejarah yang berkaitan dengan peristiwa politik dan keamanan nasional pada 1965. Hari Kesaktian Pancasila kemudian diperingati setiap 1 Oktober sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia dalam mempertahankan dan meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara. Momentum tersebut berbeda dengan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni berdasarkan Keputusan Presi-

den Nomor 24 Tahun 2016.
Secara historis, proses pembentukan Pancasila sendiri berlangsung melalui sejumlah tahapan pada 1945. BPUP dan Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat Pancasila pertama kali diperkenalkan Sukarno sebagai dasar negara dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Rumusannya kemudian berkembang melalui Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan mencapai rumusan final dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.
Karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Buton Selatan tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan seremonial. Pemerintah daerah mendorong agar nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat kebangsaan diterjemahkan ke dalam pelaksanaan pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat.
Melalui peringatan tersebut, Pemkab Buton Selatan kembali mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pesan itu sekaligus menempatkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai ruang refleksi atas perjalanan sejarah bangsa dan tanggung jawab generasi sekarang dalam menjaga persatuan Indonesia. (*)

Dukungan Disulkan Hampir Rp600 Juta, Buton Selatan Bersiap Hadapi Porprov Sultra ke XV di Kendari, Andalkan Silat Untuk Raih Prestasi

jakan efisiensi anggaran.
“Dana tersebut menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, apalagi di tengah upaya efisiensi anggaran saat ini. Kita tidak bisa menyamakan dengan daerah lain,” ujar La Salimu saat ditemui Baubau Post, Selasa (29/9/2026).
Menurut La Salimu, penyelenggaraan Porprov berada dalam koordinasi KONI, sedangkan pemerintah daerah berperan memberikan dukungan pembiayaan. Karena itu, Pemkab Buton Selatan dan KONI terus berkoordinasi untuk

memastikan kebutuhan kontingen dapat dipersiapkan sesuai kemampuan daerah.
“Peran pemerintah daerah adalah memberikan dukungan anggaran yang dituangkan dalam bentuk dana hibah. Jadi kita bekerja sama dan terus berkoordinasi antara pemerintah daerah dengan KONI,” katanya.
Dari 20 cabang olahraga yang telah terdaftar, daftar resmi cabang yang nantinya benar-benar akan diikuti kontingen Buton Selatan masih dalam tahap penetapan. Meski demikian,

an, cabang olahraga silat telah diposisikan sebagai salah satu kekuatan utama daerah dalam menghadapi ajang olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.
Porprov merupakan bagian dari tradisi pembinaan olahraga daerah di Indonesia yang berkembang dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) sejak 1948. Secara lebih luas, kompetisi olahraga antar-daerah menjadi salah satu jalur pembinaan atlet sebelum memasuki jenjang nasional dan internasional.

Cabang pencak silat sendiri memiliki akar tradisi yang kuat di Indonesia dan resmi dipertandingkan di tingkat internasional, termasuk dalam Asian Games sejak 2018.
La Salimu meminta seluruh atlet dan kontingen Buton Selatan menjadikan Porprov XV sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperjuangkan prestasi daerah. “Semua harus berjuang meraih prestasi. Untuk Porprov nanti, harus tampil dengan semangat penuh di kejuaraan tersebut,” tandasnya. (*)

Hari Jadi Kota Baubau ke-25 Sebagai Darah Otonom, Dinkes Perkuat Edukasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis Pada 80 Pelajar SMAN 1

Kota Baubau. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Baubau ke-485 sekaligus HUT Otonom ke-25 Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Baubau itu melibatkan kepala sekolah dan jajaran dewan guru. Materi disampaikan Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Baubau Yuslina, SKM., M.Si., bersama dr. WD Arsina Anwar dari Puskesmas Bataraguru. Edukasi menyasar remaja sebagai kelompok yang dinilai penting dibekali informasi kesehatan sebelum memasuki usia produktif, pernikahan, dan fase reproduksi.
Selain mengenalkan risiko ketiga penyakit tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan Triple Elimination serta situasi epide-

miologi HIV, sifilis, dan hepatitis di Kota Baubau. Dinkes juga menjelaskan jalur penularan, termasuk hubungan seksual berisiko serta paparan cairan tubuh atau darah yang terkontaminasi.
Yuslina mengatakan pendidikan kesehatan bagi pelajar tidak sebatas memberikan pengetahuan mengenai penyakit, tetapi juga membangun kemampuan remaja mengambil keputusan yang bertanggung jawab. “Literasi kesehatan reproduksi penting agar siswa memperoleh informasi medis yang benar dan tidak terjebak mitos maupun disinformasi,” katanya, Jumat 2 Oktober 2026
Menurut dia, pendekatan edukasi juga diarahkan

pada pencegahan perilaku berisiko, termasuk penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Di sisi lain, sekolah mendorong menjadi lingkungan yang mampu mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV (ODHIV) maupun penderita hepatitis B dan sifilis. Siswa peserta kegiatan juga diharapkan dapat berperan sebagai peer educator yang menyebarkan informasi kesehatan kepada teman sebaya dan keluarga.
Secara global, upaya mengintegrasikan pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak telah berkembang selama lebih dari satu dekade. WHO mencatat tujuan eliminasi penularan dari ibu ke anak mulai mendapat tonggak penting sejak 2010, sedangkan kriteria global untuk eliminasi HIV dan sifilis dikembangkan pada 2014.

Wakili Sultra, BKMT Buton Selatan Sabet Juara 1 Paduan Suara Nasional di Jakarta



langsung 24-26 September 2026. Selain paduan suara, festival tersebut mempertandingkan Mars BKMT, MTQ, pidato, dan seni rebana qasidah. Pada rangkaian yang sama, Mukhtar X BKMT membahas pertanggungjawaban kepengurusan 2021-2026, program kerja, sidang komisi, serta pelantikan pengurus periode 2026-2031.
Secara historis, BKMT merupakan wadah nasional yang berkembang dari aktivitas majelis taklim di tengah masyarakat Indonesia. Organisasi ini kemudian menjadi ruang pembinaan kea-

gamaan, pendidikan, sosial, dan silaturahmi bagi anggota majelis taklim di berbagai daerah. Perkembangan tersebut membuat kegiatan BKMT tidak hanya berorientasi pada pembinaan keagamaan, tetapi juga memberi ruang bagi ekspresi seni dan kebudayaan Islam, termasuk melalui festival dan perlombaan.
Setelah meraih gelar juara nasional, kontingen BKMT Buton Selatan dijadwalkan kembali tampil pada puncak Tasyakur Milad ke-45 BKMT di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/9/2026). “Kami

bangga bisa membawa nama Sulawesi Tenggara, khususnya Buton Selatan, dikenal di kancah bangsa,” ujar Sitti Norma Adios.
Prestasi tersebut menambah catatan kiprah BKMT Buton Selatan sekaligus memperluas representasi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan organisasi majelis taklim tingkat nasional. Bagi kontingen daerah, kemenangan di Jakarta menjadi hasil dari proses berjenjang, mulai dari kompetisi tingkat provinsi hingga tampil sebagai juara pada panggung nasional. (*)

Pada 2022, WHO memperluas kerangka tersebut dengan memasukkan hepatitis B dalam panduan Triple Elimination.
Perkembangan terbaru menunjukkan agenda tersebut terus bergerak di tingkat internasional. Pada 2025, WHO menerbitkan panduan khusus perencanaan Triple Elimination dan pada tahun yang sama melakukan prakualifikasi tes cepat terpadu yang dapat mendeteksi HIV, hepatitis B, dan sifilis. WHO juga mencatat Maladewa sebagai negara pertama yang

memperoleh validasi eliminasi penularan ketiga penyakit tersebut dari ibu ke anak pada 2025.
Menutup kegiatan di SMAN 1 Baubau, panitia menggelar kuis interaktif untuk mengukur pemahaman peserta. Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan antusias. “Melalui semangat ‘Stop Stigma dan Diskriminasi’, kami berharap edukasi ini melahirkan generasi muda Baubau yang sehat, cerdas, berakhlak, serta terlindungi dari ancaman HIV, sifilis, dan hepatitis,” ujar Yuslina. (*)

Dr Moh Tasdik Wakil Wali Kota Baubau Buka Muslok IV ORARI, Pemkot Minta ORARI Adaptif Hadapi Perkembangan Teknologi Komunikasi Kebencanaan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mendorong Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Kota Baubau memperkuat kapasitas organisasi agar mampu menjadi salah satu penopang komunikasi alternatif, terutama ketika bencana atau gangguan infrastruktur menyebabkan jaringan telekomunikasi dan listrik tidak berfungsi.

Dorongan itu disampaikan Staf Ahli Wali Kota Baubau Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dr Mohamad Tasdik MSi saat membuka Musyawarah Lokal (Muslok) IV ORARI Lokal Kota Baubau, Sabtu (3/10/2026). Tasdik hadir mewakili Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim dalam forum yang mengusung tema “Mewujudkan ORARI Lokal Kota Baubau yang Solid, Adaptif, dan Berdaya Guna dalam Pengembangan Komunikasi Radio Amatir”.

Menurut Tasdik, posisi radio amatir menjadi penting

bagi Baubau karena karakter wilayahnya sebagai daerah kepulauan dan pesisir yang memiliki kerentanan terhadap bencana. Dalam keadaan darurat, komunikasi berbasis radio dapat membantu menghubungkan masyarakat, relawan, dan pemerintah ketika saluran komunikasi utama mengalami gangguan. “Radio amatir tidak hanya berkaitan dengan hobi, tetapi juga dapat memiliki manfaat sosial ketika masyarakat membutuhkan jalur komunikasi alternatif,” katanya.

Ia mengatakan Muslok bukan sekadar forum pergantian atau penataan kepengurusan, melainkan momentum mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Baubau berharap ORARI mampu mempertahankan kekompakan internal, mengikuti perkembangan teknologi komunikasi, dan memperluas kontribusinya melalui kegiatan yang terukur.

Ruang kolaborasi juga terbuka antara ORARI dan perangkat daerah Pemerintah Kota Baubau, terutama dalam bidang kebencanaan, pelayanan publik, serta edukasi komunikasi radio kepada generasi muda. “Kami berharap ORARI dapat semakin solid, adaptif, dan berdaya guna sehingga keberadaannya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Tasdik.

Muslok IV tersebut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Baubau, Ketua ORARI Daerah Sulawesi Tenggara bersama jajaran pengurus, serta Dewan Penasihat ORARI Lokal Kota Baubau. Setelah pembukaan, peserta melanjutkan kegiatan dengan agenda persidangan untuk membahas arah organisasi dan kepengurusan berikutnya.

Secara historis, komunikasi radio amatir berkembang seiring kemajuan teknologi radio pada abad ke-20 dan kemudian digunakan tidak hanya untuk komunikasi an-

tarpenggemar, tetapi juga mendukung komunikasi darurat di berbagai negara. Di Indonesia, kegiatan radio amatir berkembang sejak pertengahan abad ke-20 dan menjadi salah satu latar terbentuknya wadah organisasi radio amatir nasional sebelum kemudian dikenal sebagai ORARI. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi radio dapat memiliki fungsi sosial ketika infrastruktur komunikasi konvensional menghadapi keterbatasan.

Karena itu, Muslok IV ORARI Lokal Kota Baubau diharapkan menghasilkan kepengurusan yang mampu menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam program kerja konkret. “Mari kita ikuti seluruh rangkaian musyawarah dengan semangat kebersamaan dan mengedepankan musyawarah untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi,” kata Tasdik. (*)

Kotamara Ditata Jelang HUT Baubau, Gerobak Pedagang Jadi Perhatian Pemkot



Pewarta: Firman

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memperketat penataan kawasan Kotamara menjelang rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Baubau. Penataan terutama menyasar gerobak dan lapak pedagang yang ditinggalkan di ruang publik serta kesiapan lokasi pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penataan itu dipantau langsung Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., bersama Wakil Wali Kota Baubau dan Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., Kamis malam, 1 Oktober 2026. Rombongan menyusuri kawasan Kotamara untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memetakan titik-titik yang akan digunakan dalam rangkaian kegiatan HUT.

Menurut La Ode Darus Salam, keberadaan gerobak yang tidak lagi digunakan tetapi tetap dibiarkan di kawasan publik menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Selain mengganggu estetika kawasan, sarana dagang yang tidak tertata berpotensi mengurangi kenyamanan masyarakat yang menggunakan ruang publik tersebut.

“Kunjungan kita malam hari ini merupakan rangkaian penertiban para pedagang UMKM kita yang ada di Kotamara. Sebagaimana kita ketahui, banyak gerobak yang sudah tidak difungsikan namun tetap ditinggalkan. Sehingga ini perlu kita tertibkan,” kata La Ode Darus Salam.

Pemerintah kota meminta pedagang membawa dan menyimpan gerobak mereka di tempat yang layak setelah aktivitas perdagangan berakhir. Kebijakan tersebut ditujukan agar badan jalan dan ruang publik tidak dipenuhi sarana usaha yang sudah tidak beroperasi.

“Kami sampaikan kepada para penjual agar setelah berjualan, gerobaknya jangan disimpan di pinggir jalan, tetapi disimpan baik-baik di tempat yang tidak mengganggu keindahan dan kebersihan Kotamara,” ujarnya.

Penataan Kotamara juga berkaitan dengan persiapan pameran UMKM dalam rangka HUT Kota Baubau. Pemerintah daerah ingin aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan, tetapi bersamaan dengan itu kebersihan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas harus terjaga.

La Ode Darus Salam mengatakan penataan tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan seremoni hari jadi. Pemerintah daerah menginginkan kawasan Kotamara yang merupakan salah satu ruang interaksi masyarakat Baubau dapat dikelola secara tertib secara berkelanjutan.

“Penataan kawasan Kotamara tidak bersifat musiman atau sekadar menyambut seremoni hari jadi kota. Lingkungan yang tertata rapi, bersih, dan aman diharapkan menjadi standar permanen demi kenyamanan seluruh masyarakat Kota Baubau,” tuturnya.

Secara historis, penataan ruang publik dan pengelolaan pedagang kaki lima menjadi persoalan yang muncul bersamaan dengan pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Sejak era pembangunan perkotaan modern pada abad ke-20, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan fungsi ruang publik, aktivitas ekonomi informal, kebersihan, serta hak masyarakat menggunakan fasilitas bersama.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai kota dunia. Pertumbuhan perdagangan informal di ruang publik mendorong banyak pemerintah kota melakukan penataan dengan pendekatan yang beragam, mulai dari penyediaan lokasi khusus hingga pengaturan jam dan tata letak aktivitas usaha. Dalam konteks Baubau, penataan Kotamara diarahkan agar kegiatan ekonomi UMKM tetap mendapat ruang tanpa mengorbankan fungsi kawasan sebagai ruang publik.

Dengan penataan tersebut, Pemkot Baubau berharap pelaksanaan rangkaian HUT Kota Baubau, termasuk pameran UMKM, dapat berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas. Pemerintah juga mendorong pedagang dan masyarakat ikut menjaga kawasan agar standar kebersihan dan ketertiban dapat dipertahankan setelah momentum hari jadi berakhir. (*)